



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Inspektorat Audit DD dan ADD 122 Desa

CURUP - Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong mempersiapkan audit terhadap penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). DD dan ADD tahun 2024 yang akan diaudit yang diterima 122 desa di Kabupaten Rejang Lebong.

Audit tersebut sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong digunakan secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, Gusti Maria, SH, MM mengungkapkan, sejak beberapa tahun terakhir, pengawasan terhadap penggunaan DD dan ADD telah menjadi fokus utama pemerintah untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan dana tersebut benar-benar berdampak positif bagi masyarakat di tingkat desa.

Namun, hasil audit tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar desa belum mampu menyusun laporan pertanggungjawaban dengan baik. Baik dari segi keuangan maupun administratif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dana serta ketidaktransparan dalam pengelolaannya.

Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk melakukan monitoring langsung terhadap penggunaan DD dan ADD di 122 desa yang tersebar di 15 kecamatan di wilayah tersebut. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap desa telah melengkapi seluruh laporan pertanggungjawaban atas penggunaan DD dan ADD.

"Dalam beberapa kesempatan, ditemukan bahwa desa-desa di Kecamatan Sindang Beliti Ilir dan Kecamatan Binduriang menghadapi kendala serupa yang mengakibatkan pengembalian sebagian dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," terang Gusti.

Gusti menekankan pentingnya persiapan dokumen-dokumen laporan secara baik bagi masyarakat di tingkat desa.

Namun, hasil audit tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar desa belum mampu menyusun laporan pertanggungjawaban dengan baik. Baik dari segi keuangan maupun administratif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dana serta ketidaktransparan dalam pengelolaannya.

Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk melakukan monitoring langsung terhadap penggunaan DD dan ADD di 122 desa yang tersebar di 15 kecamatan di wilayah tersebut. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap desa telah melengkapi seluruh laporan pertanggungjawaban atas penggunaan DD dan ADD.

"Dalam beberapa kesempatan, ditemukan bahwa desa-desa di Kecamatan Sindang Beliti Ilir dan Kecamatan Binduriang menghadapi kendala serupa yang mengakibatkan pengembalian sebagian dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," terang Gusti.

Gusti menekankan pentingnya persiapan dokumen-dokumen laporan secara menyeluruh oleh setiap desa sebelum tim inspektorat melakukan kunjungan lapangan. Hal ini dianggap krusial untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di tahun-tahun mendatang.

"Saat kami turun ini nanti, kita akan meminta desa-desa untuk menyiapkan dokumen-dokumen untuk laporan, sehingga saat kita turun lagi di awal tahun nanti sudah siap," ungkap Gusti.

Diungkapkan Gusti, pada audit tahun sebelumnya telah menghasilkan beberapa temuan yang signifikan terkait dengan penggunaan dana desa. Temuan ini termasuk penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh beberapa desa tertentu, yang mengharuskan desa-desa tersebut untuk mengembalikan sebagian dana kepada pemerintah daerah.

"Meskipun temuan ini telah ditindaklanjuti oleh masing-masing desa terkait, kerja sama antara Ipda dengan desa-desa menjadi kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.

Gusti juga menambahkan, bahwa pengawasan yang ketat terhadap penggunaan DD dan ADD memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dengan adanya transparansi yang terjamin, masyarakat dapat lebih percaya terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan dana publik.

"Selain itu, proses audit yang transparan juga membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan DD dan ADD untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Selain itu, Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong juga aktif bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, dalam menangani potensi kasus pelanggaran yang mungkin terjadi di tingkat desa.

"Ini menunjukkan komitmen kami untuk menyelesaikan masalah hukum dengan adil dan transparan, serta membantu desa-desa dalam menghadapi permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan dana desa," bebarnya.

Gusti menekankan, audit terhadap penggunaan DD dan ADD di Kabupaten Rejang Lebong bukan hanya sekadar upaya rutin untuk memeriksa laporan keuangan, namun juga merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik yang baik.

"Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap dana publik serta mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa," jelas Gusti. (sly)